BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Money Ethics*

2.1.1.1 Pengertian *Ethics*

Menurut Irham Fahmi (2013:2) mendefinisikan etika sebagai berikut:

> "Etika berasal dari kata yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan". Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut."

Sedangkan etika menurut para ahli dalam Abuddin (2000:88) sebagai berikut:

1. "Ahmad Amin berpendapat, bahwa Etika merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.
2. Soegarda Poerbakawatja mengartikan Etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan tentang baik buruk, serta berusaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan juga pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.
3. Ki Hajar Dewantara mengartikan Etika merupakan ilmu yang mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia semaunya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran

> dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka etika merupakan sesuatu di mana yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Etika berarti manajemen dalam mengusahakan laba harus tunduk pada norma-norma sosial di lingkungan mereka bekerja dan tidak boleh menipu masyarakat.

2.1.1.2 Macam-Macam Etika

Etika hanya mengadakan kajian terhadap sistem nilai atau moralitas. Sehingga macam etika ditentukan oleh obyek kajian yang dilakukan**.** Menurut Burhanuddin Salam (2000:21) menyebutkan beberapa macam etika yang meliputi:

1. *"Algedonsic Ethics*, (Etika yang membicarakan masalah kesenangan dan penderitaan).
2. *Business Ethics*, (Etika yang berhubungan dalam hal perdagangan).
3. *Educational Ethics*, (Etika yang berlaku berhubungan dalam pendidikan).
4. *Hedonistic Ethics*, (Etika yang hanya mempersoalkan masalah kesenangan dengan cabang-cabangnya).
5. *Humanistic Ethics*, (Etika kemanusiaan, membicarakan norma-norma hubungan antara manusia atau antar bangsa).
6. *Idealistic Ethics*, (Etika yang membicarakan sejumlah teori-teori etika yang pada umumnya berdasarkan psikologi dan filsafat).
7. *Materialistic Ethics*, (Etika yang mempelajari segi-segi etika ditinjau dari segi materialistik, lawan dari kata idealistik).

8. *Islamic Ethics*, Cristian Ethics, Buddism Ethics, dan sebagainya yang membicarakan tentang etika agama."

Etika uang *(Money ethics)* adalah sub sistem dari *Materialistic Ethics*, (Etika yang mempelajari segi-segi etika ditinjau dari segi materialistik, lawan dari kata idealistik).

2.1.1.3 Metode Ilmu Etika

Pendekatan dan metode dalam etika, menurut Franz Magnis Suseno dalam Kurnato (1997:7) diuraikan ada empat jenis, diantaranya:

1. "Metode empiris diskriptif
   Metode empiris diskriptif yaitu memastikan fakta moral dengan melukiskan bagaimana bentuknya, dibanding dengan bentuk budaya dan norma pada masyarakat yang lain, dilukiskan sejarahnya, luas jangkauan dan pengaruhnya dan sebagainya. Pendalaman dapat digambarkan ciri-ciri dari orang-orang yang sependapat, dibandingkan dengan ilmu-ilmu empiris yang lain.
2. Metoda fenomenologis
   Metoda fenomenologis berarti memperhatikan dengan seksama unsur-unsur yang terkandung dalam pengalaman atau kesadaran moral. Metode ini adalah unsur penting untuk mengukur kedalaman dibidang moral, misalnya perbedaan bidang norma-norma moral, norma-norma kesopanan dan lain-lain yang secara otomatis dapat terungkap dan dapat digali.
3. Metoda normatif
   Metoda normatif yang dilakukan dalam bentuk mempersoalkan, apakah suatu norma diterima secara umum atau berlaku hanya untuk masyarakat tertentu saja. Mempersoalkan juga apakah norma itu memang tepat atau bahkan harus ditolak. Mendalami hal-hal semacam itu atas norma yang diberlakukan adalah tugas etika normatif.
4. Metoda metaetika
   Metoda metaetika berarti usaha untuk mencegah kekeliruan atau kekaburan pendekatan fenomenologis dan normatif dengan mengupas arti yang tepat tentang istilah moral."

Keempat metode ini dapat dilakukan secara terpisah atau dilakukan bersamaan, tergantung maksud dan tujuan pendalaman, serta keluasan jangkauan pendalaman yang dilakukan.

2.1.1.4 Fungsi Etika

Etika sebagai suatu ilmu, merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sifat praktis, normative dan fungsional, sehingga dengan demikian merupakan suatu ilmu yang langsung berguna dalam pergaulan hidup sehari-hari. Etika juga dapat menjadi asa dan menjiwai norma-norma dalam kehidupan, disamping sekaligus memberikan penilaian terhadap corak perbuatan seseorang sebagai manusia.

Menurut Frenz Magnis-Suseno dalam I Gede A. B Wiranata (2005:47) dalam bukunya menuliskan etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam kehidupan dengan moralitas yang membingungkan. Etika adalah pemikiran sistematis dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian ini berlandaskan pemikiran tentang kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik dan masa transformasi masyarakat menuju modern, proses perbuatan sosial berpotensi dan bermoral.

Menurut Darji Darmohirharjo yang dikutip oleh Supardi, menyatakan bahwa etika itu memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan, yang senantiasa diajukan *Pertama*, apa yang harus kita lakukan dalam situasi kongkret yang tengah dihadapinya? *Kedua*, bagaimana kita akan mengatur pola konsistensi kita dengan orang lain? *Ketiga* pertanyaan tersebut dapat diintisarikan pada fungsi utama menurut Magnis Suseno. Dari sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran yang sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebig mendasar dan kritis.

Bertitik tolak dari fungsi etika yang diungkapkan Magnis Suseno, maka apabila etika berorientasi pada pesan moral, timbul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan peran agama sebagai suatu institusi yang mengajarkan mengenai pesan-pesan moral?

Menjawab pertanyaan tersebut, Franz Magnis Suseno menyatakan ada empat alasan yang melatarbelakangi fungsi etika, yaitu:

a. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas moral agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan suatu perbuatan.
b. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan.
c. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.

2.1.1.5 Indikator Etika

Cohen et al. (1980) menyatakan bahwa orientasi setiap individu pertama tama ditentukan oleh kebutuhannya. Kebutuhan tersebut menentukan harapan atau tujuan dalam setiap perilakunya sehingga pada akhirnya individu tersebut menentukan tindakan apa yang akan diambilnya. Higgins dan Kelleher (2005) menjelaskan alternatif pola perilaku untuk menyelesaikan dilema etika dan konsekuensi yang diharapkan oleh fungsi yang berbeda akan menentukan orientasi etis. Tetapi ada penentu lain dari orientasi etis yang dapat menunjukkan adanya perbedaan individu, antara lain standar perilaku individu, standar perilaku dalam keluarga serta standar perilaku dalam komunitas (Tsalikis dan Fritzsche,

1998; wiley, 1998). Higgins dan Kelleher (2005) mengungkapkan alternatif lain dalam menyelesaikan dilema etika yaitu orientasi etika. Orientasi etika dikendalikan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme Forsyth (1980). Idealisme mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh individu dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar nilai-nilai moral Forsyth (1980). Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku etis Forsyth (1980).

Idealisme dalam penelitian ini adalah suatu hal yang dipercaya individu tentang konsekuensi yang dimiliki dan diinginkan tidak melanggar nilai-nilai etika, Forsyth (1980). Idealisme diukur dengan menggunakan sepuluh item yang dikembangkan Forsyth (1981) yaitu pemeriksa memastikan bahwa hasil pemeriksaan mereka tidak pernah secara sengaja merugikan orang lain, perbuatan merugikan orang lain tidak dapat ditolelir oleh pemeriksa, melakukan tindakan untuk merugikan orang lain adalah tindakan yang salah walaupun tindakan tersebut menguntungkan pemeriksa, pemeriksa tidak boleh menyakiti dan merugikan orang lain secara fisik maupun psikologis, pemeriksa tidak boleh melakukan tindakan yang mungkin mengancam kehormatan dan kesejahteraan orang lain, pemeriksa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain yang tidak bersalah, dalam memutuskan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak bermoral pemeriksa perlu mempertimbangkan konsekuensi negatif dan positif dari perbuatan tersebut, martabat dan kesejahteraan menjadi perhatian paling penting dalam suatu masyarakat, pemeriksa jangan sampai mengorbankan kesejahteraan orang lain,

tindakan moral adalah tindakan yang sesuai dengan tindakan-tindakan yang sifatnya ideal/sempurna.

Relativisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap penolakan terhadap nilai-nilai etika dalam mengarahkan perilaku etis forsyth (1980). Selain mempunyai sifat idealisme, dalam diri seseorang juga terdapat sisi relativisme. Relativisme diukur dengan menggunakan enam item yang dikembangkan Forsyth (1981) yaitu tidak ada prinsip-prinsip etika yang dijadikan bagian dari kode etik pemeriksa, aturan-aturan etika berbeda antara komunitas pemeriksa dengan komunitas yang lain demikian juga dengan penerapannyaberbeda antara situasi satu dengan yang lainnya, prinsip-prinsip harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya subjektif, adanya perbedaan dalam sistem atau sikap moral tidak dapat dianggap sebagai suatu perbedaan yang telah menjadi sifat atau karakteristik dari prinsip-prinsip moral, pertanyaan-pertanyaan tentang apakah sesuatu itu bersifat etis atau tidak bagi setiap orang tidak akan pernah bisa diselesaikan karena apa yang dianggap bermoral atau tidak bermoral tergantung pada penilaian individu, prinsip-prinsip moral adalah aturan yang sifatnya personal, yang mengidentifikasikan bagaimana seseorang seharusnya bertingkah laku dan tidak dapat digunakan untuk membuat penilaian terhadap orang lain.

2.1.1.6 Etika Uang *(Money Ethics)*

Berbicara mengenai *money ethics* berarti berbicara mengenai uang. Uang dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi banyak orang. Uang adalah suatu

nilai yang dapat disimpan dan standart pembayaran yang dapat ditangguhkan (Mitchell & Mickel, 1999). Uang dapat digunakan untuk memperoleh barang dan jasa, serta sebagai satuan pengukur. Berdasarkan literatur managemen juga menyimpulkan bahwa dalam level individu, uang sangat berhubungan penting dengan sikap individu yang dapat dilihat melalui kepribadiaan, biografi, dan variabel sikap (Mitchell & Mickel, 1999).

Kaya atau miskin sebenarnya hanya ada di dalam pemikiran individu. Ada orang yang merasa secara finansial miskin, tetapi ada pula yang merasa bahwa secara psikologi mereka kaya, dan begitu juga sebaliknya (Tang & Chiu, 2003). Ada ungkapan umum yang menyatakan bahwa sebenarnya bukan orang yang memiliki uang sedikit, tetapi orang yang selalu menginginkan lebih, itu barulah disebut miskin. Dari hal ini dapat dilihat bahwa seseorang yang *high love of money* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh/mendapatkan uang yang lebih banyak (Tang & Chiu, 2003). Oleh karena itu, orang-orang yang *high love of money* secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada orang-orang yang *low love of money*.

The Love of Money memiliki banyak arti secara subjek. Tang dan Luna-Arocas (2004) mendefinisikan *love of money* sebagai : 1) pengukuran terhadap nilai seseorang, atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka; 2) makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang. Kemudian Tang, Chen dan Sutarso (2008) mendefinisikan *love of money* sebagai perilaku seseorang terhadap uang; pengertian seseorang terhadap uang; keinginan

dan aspirasi seseorang terhadap uang. Di lain pihak, Sloan (2002) melihat *the love of money* sebagai keinginan terhadap uang atau keserakahan yang dibedakan dari kebutuhan individu. *The love of money* tidak mewakili "kebutuhan" seseorang akan tetapi lebih mewakili "keinginan" dan "nilai-nilai" (Locke, 1969 dalam Tang dan Luna-Arocas, 2004). "Kebutuhan" diartikan sebagai syarat tujuan yang ingin dicapai sesorang dimana "nilai-nilai" adalah keuntungan yang ingin disimpan atau yang bermanfaat yang dicari oleh orang-orang. Oleh karena itu, *the love of money* adalah alat untuk mengukur nilai-nilai, kebutuhan, dan keinginan/hasrat seseorang terhadap uang (Locke, 1969 dalam Tang dan Luna-Arocas, 2004).

The Love of Money ini merupakan *subset* dari *money ethics* yang dapat dianalisis dengan dan diukur dengan menggunakan *Money Ethics Scale* (MES). Konsep MES ini digunakan untuk mengukur subjektifnya seseorang terhadap uang. Tang (2002) telah mengembangkan *Money Ethics Scale* berdasarkan faktor afektif, perilaku, dan kognitif.

Menurut Tang (2002) faktor kognitif yang berhubungan dengan seberapa pentingnya uang dibagi menjadi empat yaitu :

1. *"Motivator*
   Orang-orang bekerja untuk menghasilkan uang akan tetapi mereka bekerja lebih keras untuk meningkatkan kehidupan pribadi mereka (Nkundabanyanga, Mpamizo, Omagor, Ntayi, 2011). Dalam hal ini uang dapat dipandang sebagai motivator dalam kehidupan seseorang dan penggerak untuk pencapaian tujuan (Gupta & Shaw, 1998). Menurut Tang dan Chiu (2003), sesorang yang sangat mencintai uang (1) termotivasi untuk melakukan apa saja agar dapat menghasilkan lebih banyak uang, (2) dapat dikendalikan dengan sistem *reward external*, (3) memiliki penentuan nasib sendiri yang rendah dan *locus of control* yang tinggi (Tang, 1993) (4) memiliki pengalaman ketidakpuasan dalam hidup dan pembayaran (Tang, 1993).

2. *Success*
   Kesuksesan seseorang dapat diangggap sebagai indikator dalam level status sosial. "Di Amerika, uang adalah bagaimana kita mencetak angka dan *income* digunakan untuk menentukan kesuksesan" (Rubenstein, 1981). Kesuksesan mewakili pandangan orang-orang bahwa "obsesi terhadap uang merupakan tanda kesuksesan" (Furnham & Argyle, 1998 dalam Tang, 2002).
3. *Importance*
   Uang dipandang sebagai faktor yang penting dalam kehidupan manusia (Mitchell & Mickel, 1999). Uang dianggap sebagai hal yang berharga dan menarik (Tang, 2002) karena dengan uang mereka dapat meningkatkan gaya hidup, status sosial, dan kepuasaan individu.
4. *Rich*
   Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang ingin menjadi kaya dan mempunyai banyak uang (Tang & Chiu, 2003). Dengan menjadi kaya hidup seseorang akan menjadi lebih nyaman. Lebih baik menjadi kaya daripada miskin karena dengan uang dapat memenuhi segala kebutuhan seseorang (Tang & Chiu, 2003)."

2.1.2 *Tax Evasion*

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Berikut ini merupakan definisi mengenai pajak menurut beberapa ahli, yaitu:

Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2013:1) mendefinisikan bahwa :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Pengertian pajak menurut S.I.Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013:1) sebagai berikut:

> "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

> peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Definisi pajak dalam buku Mohammad Zain (2007:10) yang dikemukakan oleh Adriani (2003) menjelaskan bahwa:

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pajak dipungut sebagai kewajiban pajak berdasarkan undang-undang dan pelaksanaanya dapat dipaksakan untuk keperluan negara. Terdapat iuran masyarakat kepada negara yang berarti bahwa pajak tersebut dapat dipungut melalui pemerintah pusat dan daerah, tanpa mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung.

2.1.2.2 Pengertian Penggelapan Pajak *(Tax Evasion)*

Berikut ini merupakan definisi *tax evasion* menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011:15) yaitu sebagai berikut:

> "Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayar pajak. Berbagai macam realitas mengenai tidak tercapainya target penerimaan pajak, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta munculnya kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak."

Definisi lain mengenai *tax evasion* menurut Susan M. (Erly Suandy, 2008:7) berpendapat bahwa:

> *"Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. the distinction, however, is not always easy. some example of tax avoidance schemesinclude locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation ofprofit earn in low-tax foreign jurisdictions ensuring that gains are capitalrather than income so the gains are not subject to tax(or a subject at a lowerrate),spreading of income to other tax payers with lower marginal tax ratesand taking advantages of tax incentives."*

Berdasarkan pengertian tersebut *tax evasion* yaitu Penghindaran pajak adalah pengurangan pajak dengan cara ilegal. perbedaan, bagaimanapun, tidak selalu mudah. beberapa contoh skema penghindaran pajak termasuk aset *locating* di yurisdiksi lepas pantai, menunda pemulangan ofprofit mendapatkan di pajak rendah yurisdiksi asing memastikan bahwa keuntungan adalah modal daripada pendapatan sehingga keuntungan tidak dikenakan pajak (atau subjek di lowerratea), penyebaran penghasilan untuk wajib pajak lain dengan rendah ratesand pajak marginal mengambil keuntungan dari insentif pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147) definisi-definisi mengenai *tax evasion* berdasarkan pendapat para pakar, antara lain:

1. "Ernest R. Mortenson mengemukakan bahwa penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
2. Robert H.Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang."

Menurut Zain (2008:51) menjelaskan bahwa sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

a. “Tidak menyampaikan SPT
b. Menyampaikan SPT dengan tidak benar
c. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP
d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
e. Berusaha menyuap fiskus.”

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang *(irregular acts)* dalam berbagai bentuk kecurangan *(frauds)* yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

2.1.2.3 Indikator *Tax Evasion*

Penelitian mengenai *tax evasion* yang membahas dari sudut pandang etika dimulai dari Crowe (1944) dan kemudian telah dikembangkan lebih dalam oleh McGee (2006). Negara-negara yang telah diteliti oleh McGee, menemukan bahwa *tax evasion* memiliki tiga pandangan yaitu :

1. *”Tax evasion* dianggap tidak pernah etis
   Hal ini dikarenakan individu memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, individu seharusnya berkontribusi untuk membayar jasa yang telah disediakan pemerintah dan tidak hanya menjadi individu yang hanya menikmati keuntungan dari jasa-jasa yang telah disediakan pemerintah (Cohn, 1998; Tamari, 1998). *Tax evasion* etis apabila tarif pajak yang dibebankan tinggi dan jika tarif pajak tidak tinggi tetapi pemerintah tidak berhak mengambil.
2. *Tax evasion* dipandang selalu etis
   Hal ini dikarenakan individu tidak memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah yang korupsi (Block, 1993). *Tax evasion* etis apabila sistem administrasi pajak tidak adil, wajib pajak tidak mampu membayar, dan jika semua orang melakukan hal tersebut.
3. *Tax evasion* dapat dipandang etis atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada
   Penilaian etis atau tidak etisnya tindakan *tax evasion* atas dasar moral dapat dinilai dari sistem pajak, tarif pajak, keadilan, korupsi

pemerintah, atau tidak mendapat banyak imbalan atas pembayaran pajak, dan kemungkinan terdeteksi oleh fiskus (McGee & Guo, 2007). *Tax evasion* etis jika terdeteksi oleh fiskus rendah, penerimaan pajak tidak dipergunakan untuk membangun fasilitas umum, tidak digunakan secara bijaksana, tidak digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara, penerimaan pajak dikorupsi pemerintah, dan tidak merasakan manfaat langsung dari uang pajak yang disetor."

2.1.2.4 Penyebab *Tax Evasion*

Menurut Rahayu (2010:149) penyebab terjadinya tindakan *tax evasion* yaitu sebagai berikut:

1. "Kondisi lingkungan
   Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan darimanusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnyahanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasiuntuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.
2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan
   Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukupmenentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayarpajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasadirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, merekatentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja, jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.
3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Pembebanan tarif yang tinggi, menjadikan masyarakat semakin untuk terlepas dari jeratan pajak. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerjakeras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk
   Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak membingungkan, membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari`dari kewajiban membayar pajak."

Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk.

2.1.2.5 Akibat *Tax Evasion*

Menurut Siahaan (2010:110) akibat dari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion)* yaitu sebagai berikut:

1. “Dalam Bidang Keuangan
   Pengelakan pajak berarti pos kerugian bagi Negara, dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu seperti penaikan tarif pajak, keadaan inflatoir, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak yang tepat sering dikemukan falsafah sebagai berikut: Wajib pajak yang mengelakan pajak, mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang ada dikantungnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga lain yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya).
2. Dalam Bidang Ekonomi
   Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan mengelakan pajak menekan biayanya secara tidak legal, mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingannya yang tidak berbuat demikian. Pengelakan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi berputarnya roda ekonomi apabila perusahaan yang bersangkutan berusaha keras untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan menggelapkan pajak dan tidak mengusahakannya dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan produktivitas. Pengelakan pajak termaksud juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.
3. Dalam Bidang Psikologi
   Akibat-akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi sebab penggelakan membiasakan wajib pajak untuk selalu melanggar undang-undang. Apabila ia sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, ia lambat-laun tidak akan segan-segan berbuat sama dalam bidang ini. Lagipula orang tidak boleh memperkecil pengaruh psikologis yang pasti ditimbulkan oleh pengelakan pajak itu dan karena bahaya-bahaya yang mengancamnya sehubungan dengan itu, seperti kemungkinan bahwa penipuan tersebut akhirnya akan ditemukan juga, dengan konsekuensi, pembayaran yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak beberapa tahun, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayar, dan demikian itu kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit, dan sebagainnya.”

Penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

2.1.3 *Religiosity*

2.1.3.1 Pengertian *Religiosity*

Definisi mengenai *religiosity* menurut Daradjat dalam Andisti (2008:172), bahwa:

> "Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang berpegang pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran agamanya dalam sikap atau tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya."

Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa sikap religius masyarakat Indonesia tercermin pada sikap dan tingkah lakunya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama pada dasar negara Pancasila.

Definisi *religiosity* menurut Drikarya dalam Widiyanta (2005:88) yaitu:

> "kata "religi " berasal dari bahasa latin *religio* yang akar katanya adalah *religare* yang berarti mengikat."

Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa religiusitas adalah suatu kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengukuhkan diri seseorang atau

sekelompok orang dalam hubungannya dengan tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitarnya.

Definisi lain mengenai *religion* menurut Rajagukguk & Sulistianti, (2011:20) yaitu:

> "Pada dasarnya setiap agama bertujuan untuk mengajarkan kebaikan dan kemuliaan hidup karena semua agama itu baik. Agama tidak hanya mengajarkan kebaikan tetapi juga memberikan panduan mana yang benar dan mana yang salah. Agama dianggap sebagai komitmen moral untuk bertindak dalam aturan yang ditetapkan. *Religiosity* berlaku seperti suatu mekanisme penegakan aturan moral internal dari sudut pandang yang rasional. *Religion* memberikan suatu tingkat penegakkan aturan tertentu untuk bertindak dalam batas yang diterima dan sebagai "*supernatural police"*."

Beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas adalah bentuk internalisasi nilai agama dan keterikatan manusia terhadap Tuhan yang mengandung norma-norma untuk mengatur perilaku manusia tersebut dalam hubungan dengan Tuhan, manusia lain, maupun lingkungannya.

Secara konseptual religiusitas adalah sebagian dari moral yang mengatur nilai-nilai perbuatan baik dan buruk, tata peribadatan manusia kepada Tuhan, keimanan, tunduk dan taat kepada Tuhan, serta menjadikan pelakunya taat beragama yang diwujudkan dalam perilakunya sehari-hari.

Secara operasional religiusitas adalah tindakan yang memiliki nilai-nilai positif, yang mengatur adanya perbuatan baik dan buruk, mengakui adanya Allah dengan lisan dan membenarkan dengan hati, mengerjakan perintahNya dengan anggota, tunduk dan taat kepada Allah serta menjadikan pelakunya taat beragama

yang diwujudkan dalam perilakunya dan ditunjukkannya dengan melaksanakan perintah agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Alport dan Ross (1967:5) mengutarakan bahwa kebutuhan adalah variabel yang penting dalam gaya keberagamaan seseorang. Dengan adanya motif yang berbeda-beda, maka manusia pun bisa menjadi religius dengan gaya yang berbeda-beda pula. Lebih jauh lagi, sejalan dengan para psikologi sosial, Alport mengajukan dua konsep Orientasi Religius berdasarkan aspek motivasional yang mendasarinya. Mereka yang menjadikan agama sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan lain diluar agama disebut berorientasi Ekstrinsik. Sementara itu, yang menjadikan agama sebagai tujuan disebut memiliki Orientasi Religius Intrinsik.

Agama dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku seseorang bergantung pada level religiositas seseorang. Allport dan Ross (1967) Pada awalnya mengemukakan istilah "terinstitusionalisasi" dan "terinternalisasi" untuk membedakan dua sudut pandang dalam beragama. Kemudian membagi religiosity menjadi 2 dimensi/orientasi yaitu *intrinsic reliogisity* dan *extrinsic religiosity*. Glover (1997) menyatakan bahwa penalaran moral individu akan membentuk karakter yang ditimbulkan oleh keyakinan pada agama mereka . Allport (1950) mengemukakan bahwa agama berperan dalam kehidupan individu. Dia percaya bahwa karakter ekstrinsik merupakan peran eksterior agama untuk dukungan sosial atau bahkan kepuasan individu, sedangkan peran intrinsik merupakan jaminan internal yang kuat untuk agama sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari seseorang . Oleh karena itu, religiusitas ekstrinsik adalah sugestif memiliki agama untuk mendukung berbagai kepentingan seperti kepentingan bisnis. Sedangkan

religiusitas intrinsik merupakan indikasi memiliki komitmen keagamaan, tujuan rohani. Donahue (1985) lebih lanjut menyatakan bahwa religiusitas intrinsik terkait lebih tinggi dari religiusitas ekstrinsik dengan komitmen agama . Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak (Grasmick, Bursik, & Cochran, 1991). Grasmick, Kinsey dan Cochran (1991) tidak hanya mengeksplorasi efek dari kehadiran kecurangan pajak, tetapi juga mengukur afiliasi sebagai indeks pentingnya agama. Mereka menemukan bahwa mereka yang tidak berafiliasi lebih cenderung untuk menipu. Maka, Religiosity dibagi menjadi 2 indikator yaitu *intrinsic reliogisity* dan *extrinsic religiosity*.

2.1.3.2 Indikator *Religiosity*

Allport, G. W., dan Ross, (1967:447) mengemukakan bahwa agama berperan dalam kehidupan individu. Dia percaya bahwa karakter extrinsik merupakan peran eksterior agama untuk dukungan sosial atau bahkan kepuasan individu, sedangkan peran intrinsik merupakan jaminan internal yang kuat untuk agama sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari seseorang . Maka, *Religiosity* dibagi menjadi 2 indikator yaitu *intrinsic religiosity* dan *extrinsic religiosity.*

1. *Intrinsic Religiosity*

Pengertian *Intrinsic religiosity* Menurut Allport & Ross (1967:447) yaitu sebagai berikut:

> *"Intrinsic religiosity* adalah komitmen seseorang untuk memeluk agama dengan tujuan kerohanian atau spiritual (menggunakan iman untuk mempromosikan kepentingan rakyat dan menemukan cara untuk melayani agama). Karaktek *intrinsic religiosity* mewakili jaminan internal yang kuat untuk agama sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari seseorang."

Definisi lain menurut Donahue (1985:48) juga mengatakan bahwa:

> *"Intrinsic religiosity* memiliki hubungan yang kuat dengan komitmen beragama daripada *extrinsic religiosity*."

Pengertian lain menurut Grasmick, Bursik, & Cochran (1991:32) juga mengatakan bahwa:

> "Keyakinan agama yang kuat dapat mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah."

Sedangkan pengertian lain menurut Batson & Schoenrade (1991:55) yaitu:

> "Orientasi religius intrinsik merupakan cara beragama yang memikirkan komitmen terhadap agama dengan seksama dan memperlakukan komitmen tersebut dengan sungguh-sungguh sebagai tujuan akhir."

Pada individu intrinsik, ajaran agama diinternalisasikan dan diikuti secara penuh. karena Agama berfungsi sebagai *framework* dalam menjalani kehidupan. Lebih jelasnya seorang yang ber-orientasi religius intrinsik adalah seseorang yang berusaha sungguh-sungguh untuk menghayati ajaran dan mengikuti petunjuknya secara penuh.

Seorang muslim yang orientasi religius intrinsik, dengan kesadaran penuh melaksanakan ibadah dan berprilaku sesuai tuntunan agama yang timbul dari

dalam dirinya, bukan karena ada dorongan dari luar, status sosial, atau ingin mencapai pengakuan dari orang lain.

Menurut Lau (2011:10) yaitu sebagai berikut :

"Semakin seseorang beragama maka mereka akan selalu menyelaraskan perilaku mereka selalu dengan keyakinan agama mereka."

Sedangkan menurut Ismail (2012:8) yaitu sebagai berikut:

> "Orang yang hidup berdasarkan atau sesuai dengan agama yang dianutnya memiliki orientasi beragama secara intrinsik. Ide keimanan yang dimotivasi secara intrinsik bermakna bahwa iman seseorang ada dalam dan berasal dari orang tersebut. Orang ini biasanya telah mencapai tingkat kematangan pribadi dan integritas tertentu. Ia selalu berkomitmen terhadap agamanya tanpa syarat dan membuat keputusan secara independen."

Indikator dari *intrinsic religiosity* yaitu menghabiskan waktu dengan berdoa dan mengintrospeksi diri, hidup menurut kepercayaan agama, ajaran agama menjadi panduan hidup dalam bertindak, mensyukuri dan menghargai semua ciptaan allah swt, seluruh pendekatan kehidupan berdasarkan agama, menjalankan perintah agama dengan teratur, mentaati peraturan agama, Allport & Ross (1967).

Orang yang memiliki *intrinsic religiosity*, menjadikan agama sebagai motivasi hidup, hidup yang bermoral secara konsisten, bertanggung jawab terhadap sesama manusia dan juga kepada Tuhan, hidupnya berguna, dan selalu mencari kebenaran. Agama atau iman dihayati sebagai kebutuhan yang melekat dalam setiap tindakan dan merupakan bagian yang paling hakiki.

2. *Extrinsic Religiosity*

Berikut ini merupakan definisi *extrinsic religiosity* menurut Batson & Schoenrade (1991:55) yaitu sebagai berikut:

> "Orientasi Religius Ekstrinsik adalah cara pandang seseorang dalam beragama yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang berpusat pada dirinya sendiri."

Pengertian *extrinsic religiosity* menurut (Wiley & Sons,1991) adalah:

> "Dalam orientasi religius ini penekanan diberikan pada penampilan luar dari agama, aspek-aspek yang dapat diraba, berupa ritual dan terlembaga dari agama yang banyak dianggap sebagai tanda ketaatan dalam kebudayaan."

Orang-orang yang ber-Orientasi religius ekstrinsik mempunyai kecenderungan besar menggunakan religiusitasnya untuk mencapai tujuan pribadi mereka, dan bukanlah berupa motif pengarah atau motif pemandu, tetapi lebih ke motif pelayanan motif-motif yang lain. Studi Religius menunjukan bahwa terkadang hasil penelitian menunjukan adanya individu-individu dengan skor tinggi pada kedua skala Intrinsik dan Ekstrinsik. Menurut alport (1967), hal ini menunjukan bahwa sampel *indiscriminately prolegiousm*, yaitu agama diperlakukan baik tujuan akhir maupun sebagai alat untuk mencapai tujuan yang berpusat pada diri sendiri, dengan kata lain hal ini menunjukan bahwa individu masih mencari hakikat agama yang sesungguhnya.

Sebaliknya terdapat individu-individu yang mendapat nilai rendah pada kedua skala intrinsik dan ekstrinsik. Dengan demikian individu-individu

tersebut *indiscriminately antireligious*. Meraka menolak ide-ide proreligious dan berfikir dalam satu kategori luas bahwa ”agama itu buruk”. Golongan yang menolak agama tampaknya tidak terkait dalam penelitian ini, mengingat subjek dalam penelitian ini menganut agama yang berbeda-beda.

Indikator dalam *extrinsic religiosity* yaitu mengikuti kegiatan keagamaan hanya untuk memiliki banyak teman, tujuan bergama untuk mendapatakan status sosial di masyarakat, memberikan kemampuan untuk mengatasi masalah sosial, berdoa karena tuntutan sebagai umat beragama, mengikuti kegiatan keagamaan hanya untuk menghabiskan waktu Allport & Ross (1967).

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki satu jurnal utama yaitu berdasarkan Lau, Choe, & Tan (2013) akan tetapi penelitian ini juga didukung oleh jurnal-jurnal pendukung yang lain yang meneliti mengenai *money ethics*, *intrinsic religiosity*, dan *extrinsic religiosity* dengan berbagai variasi variabel dependen.

Penelitian mengenai *tax evasion* dari sudut pandang etika telah banyak dilakukan oleh McGee dan asosiasinya. Salah satunya adalah penelitian dari McGee & Guo (2007) di Cina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang etis apabila pemeritah melakukan korupsi, sistem pajak dipandang tidak adil, atau dana pajak digunakan untuk projek yang tidak disetujui oleh masyarakat. *Tax evasion* dapat dipandang tidak etis ketika *taxpayer* menggelapkan pajak untuk alasan *selfish*. Selain itu, penelitian dari

McGee & Norohna (2008) juga menunjukkan bahwa *tax evasion* dianggap etis apabila sistem pajak tidak adil, dana pajak dimasukkan dalam kantong para koruptor, *taxpayer* tidak mampu membayar. *Tax evasion* dianggap tidak etis ketika dana pajak digunakan secara bijaksana, dan dana pajak digunakan untuk proyek yang memberikan benefit bagi *taxpayer*.

Penelitian terdahulu yang utama adalah penelitian dari Lau, Choe, dan Tan (2013) yang melakukan penelitian berjudul "*The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money and Tax Evasion"*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *money ethics* memiliki pengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sedangkan *intrinsic religiosity* memiliki dampak positif dalam hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion*, akan tetapi *extrinsic religiosity* bukan menjadi moderator dalam hubungan ini.

Vitell, Paolillo, & Singh (2006) yang menemukan bahwa *intrinsic religiosity* merupakan faktor penentu yang signifikan dalam hampir semua tipe *consumer ethical belief* yang dilakukan pada 1000 konsumen dewasa. Sedangkan salah satu faktor *money ethics* yaitu *rich* memiliki pengaruh pada pandangan seseorang mengenai ketidaketisan dari berbagai praktek konsumen.

Didukung juga dengan penelitian yang sama dari Vitell, Singh, & Paolillo (2007) yang menemukan bahwa *money ethics*, *intrinsic* dan *extrinsic religiosity*, serta *attitude toward business* memainkan peran yang penting dalam *consumer ethics*. Hasil penelitian menunjukkan *intrinsic religiosity* dan *money ethics* memiliki pengaruh yang positif terhadap *consumer ethics* kecuali pada

dimensi *no harm*/*no foul* dan dimensi *doing good/recycling* sedangkan orientasi beragama ekstrinsik bukan faktor yang menentukan *consumer ethics* kecuali dimensi *doing good/recycling*.

Adapula penelitian dari Lau, Choe, & Tan (2011) yang melakukan penelitian serupa mengenai pengaruh *money ethics* dan *religiosity* terhadap *consumers' ethical beliefs*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *intrinsic religiosity* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dimensi *consumers' ethical belief* dan *extrinsic religiosity* tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap dimensi *consumer ethics*. Sedangkan *money ethics* memiliki pengaruh terhadap *consumers' ethical belief.*

Kemudian penelitian dari Tang (2002) yang berjudul "Apakah kecintaan terhadap uang merupakan akar kejahatan?". Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *the love of money* memiliki pengaruh yang langsung terhadap perilaku tidak etis. Dan juga terdapat pengaruh tidak langsung dari *the love of money* terhadap perilaku tidak etis. *The love of money* menyebabkan kepuasaan pembayaran yang rendah, yang dapat menurunkan komitmen organisasi, sehingga dapat menyebabkan perilaku tidak etis. Jadi, kecintaan terhadap uang yang tinggi justru dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku tidak etis.

Ada juga penelitian lain yang mendukung penelitian diatas yaitu Tang & Chiu (2003). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *the love of money* berhubungan langsung dengan perilaku tidak etis untuk 211 *full-time* karyawan

Hongkong. Akan tetapi *income* memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku tidak etis melalui *the love of money* sebagai mediator dari hubungan *income* dengan perilaku tidak etis [*Income-the Love of Money-Evil*].

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion*

Uang sering kali dipandang sebagai aspek yang penting di mata manusia. Uang menentukan bagaimana kepribadian dan sikap seseorang tentang seberapa pentingnya uang tersebut bagi mereka (Mitchell & Mickel, 1999). Menurut Tang (2002) terdapat pengaruh langsung antara *money ethics* dan perilaku tidak etis. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang *high money ethics* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal yang penting dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang yang *low money ethics.* Dengan memiliki banyak uang, orang-orang memiliki kepuasaan kebutuhan yang lebih tinggi dan dapat menikmati standart kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. Sehingga kecintaan mereka terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis (Tang, 2002). Selanjutnya Tang (2002) memberikan label *money ethics* sebagai *love of money* dan perilaku tidak etis sebagai *evil* atau bisa dikatakan sebagai *the love of money is the root of all evil* (kecintaan terhadap uang merupakan akar kejahatan).

Penelitian lain yang mendukung penyataan bahwa *the love of money is the root of all evil* adalah Tang & Chiu (2003). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *income* berhubungan secara tidak langsung terhadap perilaku tidak etis melalui *the love of money* dan *pay satisfaction*, karyawan Hongkong yang memiliki *low-income* memiliki level kecintaan terhadap uang yang tinggi. Orang-orang dengan kecintaan terhadap uang yang tinggi sebenarnya memiliki *pay satisfaction* yang rendah. Karyawan dengan *pay satisfaction* yang rendah cenderung untuk melakukan kejahatan dan perilaku tidak etis dalam organisasi (Tang & Chiu, 2003). Orang-orang ini melakukan tindakan tersebut karena ingin meningkatkan standar kehidupan, mencapai ke kelas sosial yang paling atas, dan mereka berani mengambil resiko serta terlibat dalam perilaku tidak etis, salah satunya adalah melakukan penggelapan pajak.

Lau, Choe, dan Tan (2013) menemukan hubungan yang positif antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Ketika seseorang menekankan pada pentingnya uang dan memperoleh kekayaan, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* dapat diterima. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang atau yang menempatkan uang sebagai prioritas utama akan percaya bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang etis. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *money ethics* memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap perilaku yang tidak etis (Tang & Chiu, 2003; Vitell, Paolillo & Singh, 2006; Vitell, Singh & Paolillo, 2007). Semakin tinggi tingkat kecintaan sesorang terhadap uang, maka semakin tinggi peluang seseorang melakukan tindakan *tax evasion* yang tidak etis.

2.2.2 Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax evasion* Dengan *Religiosity* sebagai Variabel Moderating

Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*, adanya penelitian yang mengkaitkan variabel *moderating* dalam hubungan ini. Variabel *moderating* yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah *intrinsic religiosity*. Fungsi dari variabel *moderating* ini adalah memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2012).

Lau, Choe, dan Tan (2013) berpendapat bahwa *money ethics* dapat mempengaruhi *tax evasion* melalui *intrinsic religiosity* yang dimiliki individu. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya *intrinsic religiosity* yang tinggi dalam diri seseorang dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap *money ethics* dalam praktek *tax evasion*. Individu dengan *high intrinsic religiosity* mampu mengendalikan diri untuk tidak mengambil keuntungan dalam praktek *tax evasion.* Individu yang memiliki orientasi beragama secara intrinsik memandang *tax evasion* sebagai perilaku yang tidak etis dalam hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion* dibandingkan dengan individu yang memiliki *intrinsic religiosity* yang rendah. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal

melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penggelapan pajak (Grasmick, Bursik, & Cochran, 1991).

Menurut Ismail (2012) orang yang memiliki orientasi beragama secara intrinsik tidak akan melakukan tindakan yang merugikan orang lain karena dalam hidupnya ia tidak ingin merugikan orang lain, jika perbuatan merugikan orang lain dicontohkan dengan tindakan *tax evasion*, orang yang beragama secara intrinsik tidak akan melakukan tindakan tersebut.

Dalam penelitian ini tidak hanya *intrinsic religiosity* yang dapat dijadikan variabel *moderating*, tetapi peneliti juga menggunakan *extrinsic religiosity* sebagai variabel *moderating* yang lain.

Orientasi beragama individu secara ekstrinsik cenderung menggunakan agama untuk kepentingannya sendiri (Ismail, 2012). Individu hanya memanfaatkan agama yang dianutnya. Kehadiran di gereja ataupun menjalankan ibadah hanya untuk tujuan yang lain seperti bertemu dengan relasi, tidak digunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi, agama hanya memilki peran ekstrinsik yang digunakan untuk dukungan sosial atau kepuasan individu (Allport dan Ross, 1967).

Dimensi ekstrinsik adalah prediktor yang lemah dalam hasil kehidupan yang positif yang berbeda dengan dimensi intrinsik (Salsman *et al*,. 2005). Sebagai tambahan, elemen ekstrinsik kadang kala dihubungkan dengan hasil kehidupan yang negatif (Smith, McCullough, & Poll, 2003).

Menurut Lau, Choe, & Tan (2013) individu yang memiliki orientasi beragama secara ekstrinsik tidak memoderasi hubungan diantara *money ethics* dan *tax evasion*. Orang-orang yang memiliki orientasi beragama secara ekstrinsik tidak akan terpengaruh oleh praktek *tax evasion*. Orang-orang ekstrinsik termotivasi menggunakan agamanya sedangkan orang-orang intrinsic termotivasi untuk hidup di dalam agamanya (Allport & Ross, 1967).

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

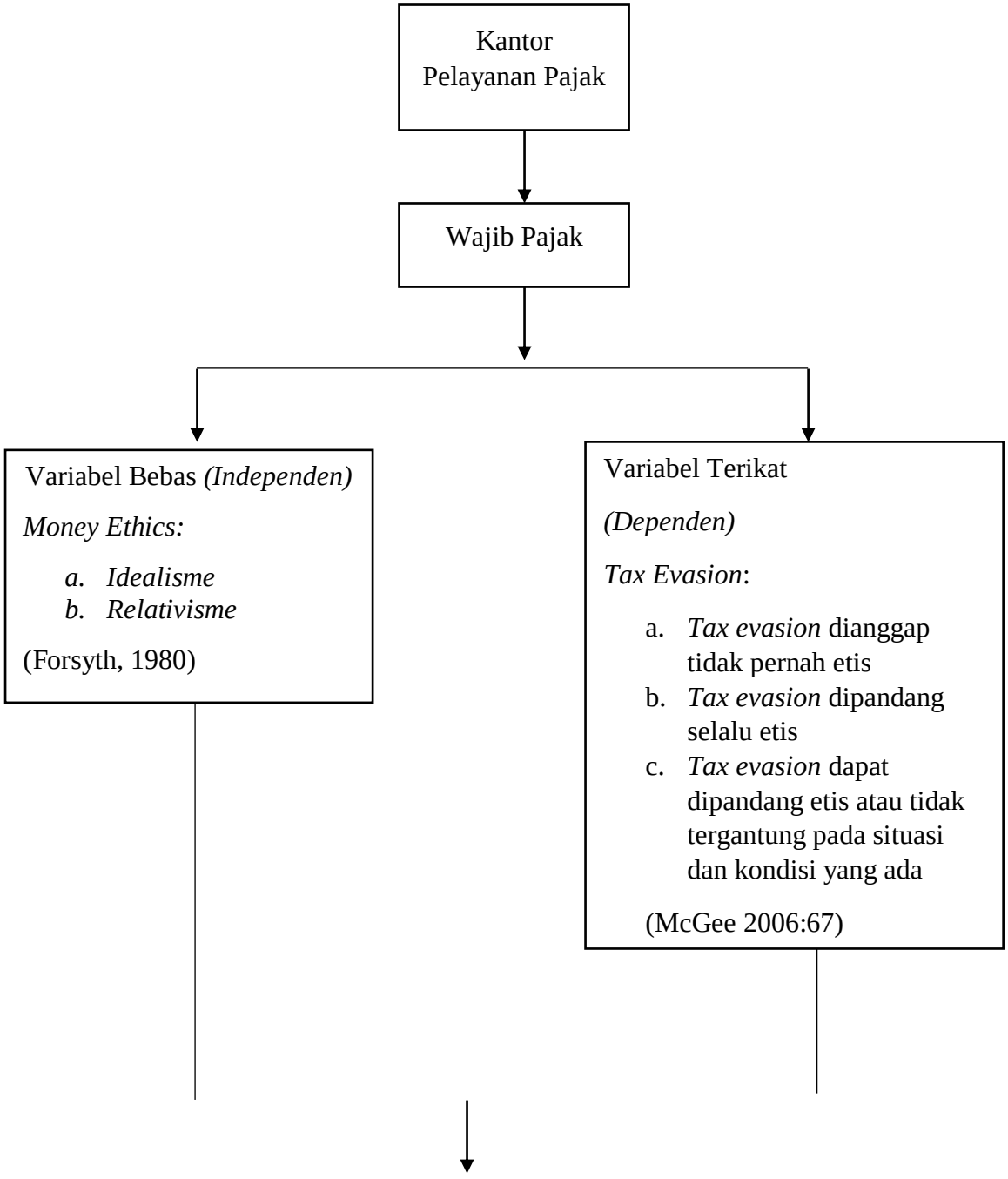

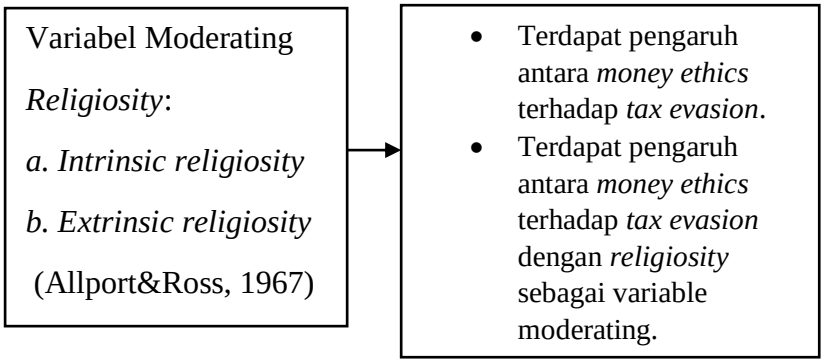

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiono, 2010:64)

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu maka penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion.*
2. Terdapat pengaruh *Money Ethic* terhadap *Tax Evasion* dengan *Religiosity* sebagai Variabel *Moderating*